

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENYAJIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL**



GEOVENNY PATANDUK

1510311015

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENYAJIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL**



**Diajukan Sebagai Laporan Tugas Akhir
Pada Program Studi D3 Akuntansi**

GEOVENNY PATANDUK

1510311015

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

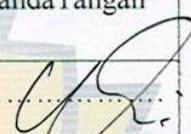
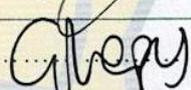
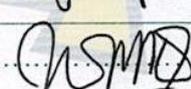
LAPORAN TUGAS AKHIR
PENYAJIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL

Disusun dan diajukan oleh :

GEOVENNY PATANDUK
1510311015

Telah dipertahankan dalam ujian Laporan Tugas Akhir
pada tanggal **12 September 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Tim Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1..... 
2.	Siprianus Palete, SE., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 

Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA.

LEMBAR PENILAIAN

Nama Mahasiswa : Geovenny Patanduk
Nim : 1510311015
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : D3 Akuntansi

Jenis Kemampuan	Penilaian Oleh Pihak Perusahaan				
	(Mohon Diisi Dengan Angka)				
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	86-100	71-85	56-70	41-55	0-40
Kedisiplinan					
Komunikasi					
Kerjasama					
Kemandirian					
Kreativitas					
Penguasaan Komputer					
Pengetahuan Akuntansi					

Makassar, 12 Mei 2018

Ketua Program Studi



Yasmi, S.E., M.Si., Ak.CA

Pihak Perusahaan

Dra. Sitti Hasanatang, M.Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geovenny Patanduk

Nim : 1510311015

Program Studi : D3 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Penyajian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah laporan tugas akhir inidalam dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 12 September 2018

Yang membuat pernyataan


Geovenny Patanduk

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “Proses Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model”

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir penyusunan tugas akhir ini, tidak luput dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas berkat dan pertolongan Tuhan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan.

Penghargaan dan terima kasih kepada Ayah Zeth Patanduk dan Ibu Adolfin Rita yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis agar menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi kebanggan keluarga.

Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Siprianus Palete, S.E, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta koreksi selama penyusunan tugas akhir. Semoga Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan dan berkat yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Pada kesempatan ini penghargaan dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Dr. Ir. Mujahid, S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Yasmi, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar, terkhusus untuk dosen-dosen D3 Akuntansi.
5. Bapak dan Ibu di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Sahabat tercinta Afrilianti Salamba, Winda, Nurmiswari, dan Putri Erawati yang selalu memberi semangat.
7. Fery Karaeng Datu sebagai sahabat hati yang meskipun jauh tetapi selalu memberidukung, semangat dan mendoakan yang terbaik.
8. Saudara saya Gabriella, Vanny, Grasela, Georgina, Viona dan Fadel yang selalu memberikan semangat dan doa.
9. Teman seperjuangan Anne dan Inggrit yang selalu ada memberikan motivasi dan doa.
10. Sahabat yang sudah seperti saudara Ine, Susanti, Novianti dan Putrisya yang selalu ada mendukung dan mendoakan yang terbaik.
11. Kakak Jelsi yang sudah membantu dalam penulisan tugas akhir.
12. Teman-teman D3 Akuntansi 2015 tanpa terkecuali yang sudah membantu, dan berjuang bersama-sama sejak awal perkuliahan, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan selama ini dan semoga Laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya. Amin.

Makassar, 05 September 2018

Geoveny Patanduk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENILAIAN.....	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Sekolah	4
2.1.1 Pengertian Sekolah	4
2.1.2 Fungsi Sekolah	6
2.1.3 Mutu Pendidikan	7
2.2 Evaluasi Pendidikan	8
2.2.1 Pengertian Evaluasi	8
2.2.2 Evaluasi Program.....	9
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi	11
2.3 Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah.....	11
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI	
3.1 Proses Bisnis / Layanan	13
3.2 Tujuan Pelayanan	13
3.3 Sistem Informasi.....	13
3.4 Sejarah Singkat	14
3.4.1 Visi dan Misi	16
3.5 Struktur Organisasi	16
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	

4.1	Hasil Kegiatan	18
4.1.1	Kegiatan Utama	18
4.1.2	Kegiatan Tambahan.....	19
4.1.3	Masalah dan Solusi.....	19
4.1.4	Temuan di LPMP	19
4.2	Pembahasan	20
4.2.1	Laporan Kegiatan BIMTEK.....	22
4.2.2	Bimbingan Teknis	23
4.2.3	Alokasi Dana Kegiatan.....	25
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	26
5.2	Saran	26
DAFTAR PUSTAKA		27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (*Dalam Sagala, 2006*), Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Oleh karena itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah Unit Pelaksana teknis Depdiknas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, LPMP memiliki tugas yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan seperti kegiatan diklat peningkatan mutu pendidikan, pemetaan mutu pendidikan dan supervisi satuan pendidikan di lingkup provinsi Sulawesi Selatan.

LPMP melaksanakan kegiatan pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang pembiayaannya dialokasikan melalui DIPA LPMP. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan sekolah model adalah kegiatan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pemerintah memberikan dana bantuan pendampingan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendampingan.

Untuk membantu LPMP dalam menjamin pemberian atau penyaluran bantuan tersebut tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat penerimaan serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka disusun Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan.

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pengimbasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model. Sehingga berdasarkan latar belakang, penulis ingin mengangkat judul yang terkait dengan latar belakang, untuk melihat sejauh mana laporan kegiatan penggunaan dana pemerintah dan apakah dana bantuan pemerintah telah pada jalur ketentuannya, maka penulis mengambil judul **“Bagaimana Penyajian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintahan Pengembangan Sekolah Model?”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyajian pelaksanaan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah untuk pengembangan sekolah model.

1.3 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi sekolah model dan Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengevaluasi pemanfaatan dana pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sekolah

2.1.1 Pengertian Sekolah

Sekolah menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 18, tentang pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bila seluruh pendapat tersebut dirangkaikan, maka dapat dipahami bahwa sekolah adalah kerja sama sejumlah orang yang menjalankan seperangkat fungsi mendasar untuk melayani kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang pelaksanaannya dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang bertingkat untuk mencapai tujuan instruksional dengan terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Sekolah juga merupakan kerja sama sejumlah orang yang terdiri dari unsur-unsur sekolah, seperti kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, tata usaha, dan sebagainya di bawah kontrol pemerintah.

Sekolah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan pemerintah, yaitu kebaikan publik. Oleh karena itu, keefektifan organisasi sekolah pada satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi khusus dari masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah disusun supaya dapat merespon berbagai perubahan yang diwujudkan dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya sekolah

yang ada, sehingga keefektifan menjadi ciri dari organisasi sekolah dan konsistensi terhadap misi sekolah menjadi jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik (*Dalam Sagala, 2006*).

Adapun pengertian sekolah menurut Hadari Nawawi (1982), “sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terikat dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai”.

Hal senada diungkapkan Reimer (*Dalam Sagala, 2006*) mengemukakan bahwa “sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat”. Selain itu, Sekolah dalam menjalankan seperangkat fungsi-fungsi mendasarnya tentu mengacu pada fungsi belajar dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan pendidikan pada masyarakat. Sekolah sebagai organisasi dalam melaksanakan fungsinya diharapkan dapat difungsikan seluruh sumber daya yang ada. Secara umum, sekolah terdiri dari sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut sekolah negeri dan sekolah yang dikelola oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang disebut sekolah swasta. UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

2.1.2 Fungsi Sekolah

Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan masyarakat melalui pembentukan kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun intelektualnya, serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi pengganti yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat bangsanya dengan budaya yang mendukungnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan terdepan dalam mendidik para siswanya memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah, disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip, dan program-program yang mendasari misinya.

Struktur organisasi sekolah menurut Gorton (Dalam Sagala, 2006), Bertujuan memfungsikan setiap anggota sesuai fungsi dan kedudukannya, menjalin hubungan kerja antar tim organisasi agar masing-masing mengetahui tanggung jawabnya dan semua anggota tim dapat melakukan kerja sama mensukseskan program sekolah. Kepala sekolah merupakan orang pertama yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, persyaratan profesional kepala sekolah menjadi penting agar mampu membangkitkan dan mempertinggi keterlibatan para anggota tim dan berupaya mendorong dan membangkitkan semangat kerja sama antar anggota tim.

Berkaitan dengan struktur organisasi, penekanan desain organisasi sekolah adalah pada peningkatan kemampuan manajemen sekolah yang semakin baik. Desain organisasi sekolah merupakan sarana mengembangkan potensi sekolah. Sekolah mengacu pada kriteria yang dapat memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap personel sekolah secara dinamis ke arah tujuan yang disepakati.

2.1.3 Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi negara. Pada umumnya, negara-negara didunia memperhatikan pendidikan negerinya dengan berbagai kebijakan, baik dalam hal membentuk undang-undang, menyediakan prasarana dan sarana, hingga pengaturan sistem pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan di dalam negerinya.

Namun seperti halnya di Indonesia, pendidikan mengalami hambatan yang serius terutama dalam kesediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Karena hal ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dukung pendidikan yang kondusif.

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Arcaro, 1999:21). Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Rohiat, 2009:52). Mutu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam hubungan antara pemberi layanan dan penerima

layanan. Sama halnya dengan dengan mutu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, mutu dalam bidang pendidikan juga penting untuk diperhatikan. Mutu pendidikan berupaya untuk memberikan kemudahan akses, keadilan dan pemerataan. Selain itu, menurut Sallis (2015) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan, diantaranya sarana dan prasarana, SDM, teknologi dan kepemimpinan.

2.2 Evaluasi Pendidikan

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3), bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan:

“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian

didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono (Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”.

2.2.2 Evaluasi Program

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua

evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting.

Suchman (Dalam Arikunto dan Jabar, 2010:1), memandang bahwa “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Defenisi lain dikemukakan oleh Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.

Evaluasi program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau nilai yang telah dicapai program. Hal tersebut seiring dengan pendapat Moekijat (1981:15), bahwa evaluasi suatu penilaian berarti penentuan nilai.

Kemudian, Bruce W Tuckman mengatakan bahwa, “evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan (process), keluaran (ouput) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi berkaitan erat dengan pengertian pengukuran (measurement)”.

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing- masing komponen. Menurut Weiss (1972:4) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah: *“The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming”*.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

2.3 Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Pengertian pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:711) yang menyebutkan bahwa “pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Selain itu, menurut Seels and Richey menyatakan “pemanfaatan ialah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar.”

Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini adalah pemanfaatan, penggunaan/alokasi dana pemerintahan terhadap pengembangan sekolah model.

Dalam penggunaan dana pemerintahan itu sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah (Mulyono, 2010:192).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana startegis satuan pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja tahunan sekolah.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Proses Bisnis/Layanan

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) adalah lembaga pemerintahan yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 116/O/1977 tanggal 23 april 1977. LPMP didirikan dengan tujuan untuk melayani masyarakat, dengan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan.

3.2 Tujuan Pelayanan

Bentuk pelayanannya adalah pendampingan sekolah, LPMP melihat dan mendengarkan secara langsung segala kondisi objektif dan keluhan tentang kebutuhan sekolah. LPMP juga mengunjungi sekolah secara berkala, sedikitnya tiga kali dalam satu tahun, yaitu pada tahap awal, pertengahan, dan akhir. Adapun kontribusi pelayanan yang diberikan yakni berupa materi dan akademik.

3.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi yang digunakan di LPMP adalah *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*, *MS. Excel* sebagai pencatatan dan penginputan data sekolah model yang menerima bantuan dari LPMP. *MS. Word* digunakan untuk segala bentuk administrasi.

3.4 Sejarah Singkat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 116/O/1977 tanggal 23 april 1977 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Penataran Guru (BPG) merupakan awal terbentuknya BPG. BPG Ujung Pandang, yang merupakan cikal bakal LPMP, diresmikan pada tanggal 27 april 1977 oleh Dirjen Kebudayaan Prof. Ida Bagus Mantra mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disusul dengan pelantikan personil pimpinan dan staf pada tanggal 27 januari 1979 oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dardji Darmodihardjo, SH berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 78360/C/3/1978.

Pada awal berdirinya tugas dan fungsi utama BPG adalah sebagai unit pelaksana teknis dalam peningkatan pendidikan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Namun tugas dan fungsi ini sebagian diambil alih oleh bidang persekolahan Kanwil Depdikbud Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dan BPG hanya berfungsi sebagai wisma atau tempat pelatihan/penataran.

Seiring perubahan yang terjadi terhadap paradigma pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan maka pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan sistem, standar mutu dan standar proses pendidikan. Sehubungan dengan hal itu maka Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) nomor:

087/O/2003 tertanggal 4 juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Sejak diterbitkannya kepmendiknas tersebut maka BPG Ujungpandang secara resmi berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu melakukan refungsionalisasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kemudian, berdasarkan Permendikbud No.15 Tahun 2015 tentang organisasi Tata Kerja LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah dan LPMP Sulawesi Selatan (Eselon II) disebutkan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model, dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi.

3.5 Visi dan Misi

Visi:

“Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Menyelenggarakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Menyelenggarakan supervisi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah;
4. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
5. Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
7. Menyelenggarakan urusan administrasi LPMP.

3.6 Struktur Organisasi

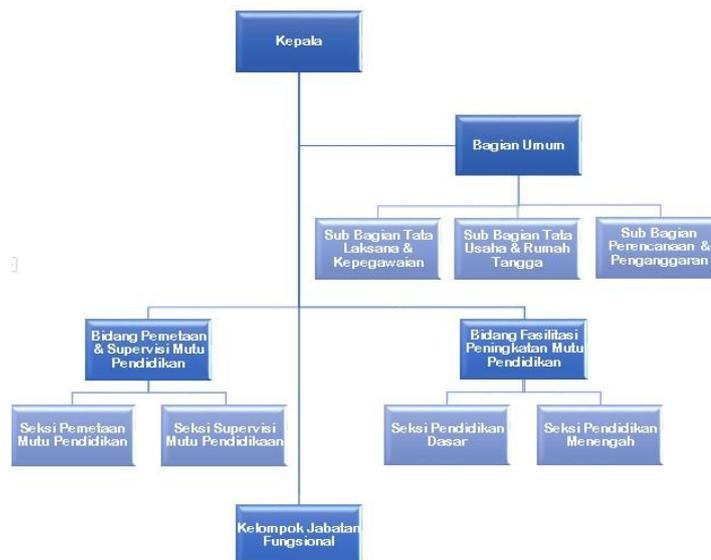
Berikut struktur organisasi LPMP Kota Makassar berdasarkan jabatan, pangkat/golongan:

Tabel 1 : Database Karyawan

NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL
Dr. H. Abd. Halim Muharram, M.Pd. 19650715 199403 1 002	Kepala LPMP	Pembina Tk. 1, IV / b
Dra. Hj. Kisdar Kasa, M.Si 19600217 198303 1 002	Kabid. FPMP	Pembina, IV / a
Drs. Saparuddin, M. Pd. 19631231 198903 1 228	Kabid. PSMP	Pembina Tk.I, IV / b
Drs. Suardi B., M. Pd. 19641009 198903 1 007	Kabag. Umum	Pembina, IV / a
Drs. Muh. Saleh Sulaeman, M.Pd 196410191992031001	Kasubag Tata Laksana & Kepegawaian	Pembina, IV / a
H.Muhammad Asad Jafar, SE,MM. 19601231 198503 1 032	Kasi Supervisi Mutu Pendidikan	Pembina, IV / a
H. Burhan T., SE., MM 19641224 199103 1 004	Kasi Pemetaan Mutu Pendidikan	Pembina, IV / a
Andi Nur Haeni, S.Sos, MM 19621115 199003 2 002	Kasi Pendidikan Dasar	Pembina, IV / a
Drs. Andi Iskandar 19680314 200112 1 001	Kasi Pendidikan Menengah	Penata Tk. 1, III / d
Dr.H. Muh. Anwar, M.Pd. 196308171989031003	Kordinator WI	Pembina Utama Muda, IV / c

Sumber: LPMP Kota Makassar, 2018

Gambar 1: Struktur Organisasi



Sumber: LPMP Kota Makassar, 2018

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Pada bab ini mengenai kegiatan penulis selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) di LPMP Provinsi Sul-Sel yang beralamat di Jl. A. Pangerang Pettarani, Banta-Bantaeng, mulai dari tgl 03 April sampai dengan 31 Mei 2018, penulis ditempatkan di bagian keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan penulis selama KKLP terbagi atas dua yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Kegiatan utama ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan penulis selama pelaksanaan dan kegiatan tambahan merupakan aktivitas penulis di KKLP yang hanya dilakukan sesekali atau sebagai tugas tambahan.

4.1.1 Kegiatan Utama

Adapun aktivitas-aktivitas utama yang penulis lakukan selama KKLP adalah sebagai berikut:

1. Menginput hasil laporan kegiatan penggunaan dana bantuan pemerintah pengembangan sekolah model.
2. Menginput hasil verifikasi dokumen sekolah setiap kabupaten.
3. Menghitung dana kegiatan pada setiap laporan penggunaan dana bantuan pemerintah.
4. Membuat format perubahan jadwal kegiatan.
5. Membuat format rencana aksi pencapaian target perjanjian kinerja.

4.1.2 Kegiatan Tambahan

1. Mengantar surat ke devisi-devisi di Kantor LPMP.
2. Mengangkat telepon dari kepala devisi atau devisi lainnya.
3. Mengarsipkan segala bentuk administratif.

4.1.3 Masalah dan Solusi

a. Masalah

1. LPMP tidak menggunakan software untuk pencatatan akuntansi dan administrasi.
2. Tidak ada format laporan kegiatan yang telah ditentukan .

b. Solusi

1. Sebaiknya LPMP menggunakan sistem microsoft excel untuk proses pencatatan akuntansi dan administrasi.
2. Sebaiknya LPMP menyediakan format laporan kerja yang telah ditentukan agar pegawai lebih mudah dalam mengerjakan laporan.

4.1.4 Temuan di LPMP

Selama pelaksanaan kegiatan KKL di LPMP dan khususnya di bagian keuangan ada beberapa hal yang penulis dapatkan antara lain, penulis dapat mengetahui gambaran umum perusahaan, lebih mahir dalam mengoperasikan komputer, dan mengetahui gambaran mengenai bentuk administratif perusahaan.

4.2 Pembahasan

Dalam bahasan ini, sesuai dengan judul yang penulis ajukan maka dalam poin ini, penulis akan membahas mengenai Penyajian pelaksanaan laporan kegiatan penggunaan dana pemerintah untuk sekolah model.

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk mejadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Maka berdasarkan judul yang diajukan peneliti mengenai sekolah model, pada sub poin bab ini penulis akan membahas tentang sekolah model.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis dari LPMP Kota Makassar mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintahan Pengembangan Sekolah Model, maka penulis mengambil data base sekolah model yang mendapat bantuan pemerintah untuk sekolah model yang tersebar di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Daftar nama sekolah model

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)		JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	
KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH
KABUPATEN LUWU	SDN 92 KARETAN	MAKASSAR	SMPN 23 MAKASSAR	LUWU	SMKN 1 BELOPA
	SDN 9 RAPE-RAPE		SMPN 12 MAKASSAR		SMAN 2 BELOPA
KOTA PALOPO	SDN 18 Maroangin	GOWA	SMPN 1 BAJENG	PALOPO	SMKN 4
	SDN 13 Tappong		SMPN 1 BONTONOMPO		SMAN 4
	SDN 12 Langkanae	TAKALAR	SMPN 1 POLONGBANGKENG	PANGKEP	SMK 2 BUNGORO
PANGKEP	SDN 19 PACCIKOMBAJA	JENEPONTO	SMPN 2 TAKALAR	BARRU	SMAN 1 PANGKAJENE
	SDN 14 BONTO-BONTO		SMPN 2 BINAMU		SMKN 4 Barru
BARRU	SDN Siddo	BANTAENG	SMPN 4 TAMALATEA	GOWA	SMAN 1 Tanete Rilau
	SD Inpres Lapao		SMPN 1 BANTAENG		SMAN 1 Sungguminasa
GOWA	SD Inpres Kompleks Ralla	JENEPONTO	SMPN 1 EREMERASA	JENEPONTO	SMKN 1 Bajeng
	SDN Alluka		SMPN 1 TOMOBULU		SMK NEG. 4 BANGKALA
	SDN Baturappe		SMPN 3 BISAPPU		SMA NEG. 2 BINAMU
JENEPONTO	SDI NO. 129 TOGO-TOGO	BULUKUMBA	SMPN 9 BULUKUMBA	TORAJA UTARA	SMKN 1 SESEAN
	SDI NO. 127 MATAERE		SMPN 1 BULUKUMBA		SMAN 1 RANTEPAO
TORAJA UTARA	SDN 7 SOPAI	KEP. SELAYAR	SMPN 1 BENTENG	BONE	SMAN 4 WATAMPONE
	SDN 3 BUNTAO'		SMPN 2 BONTOSIKUYU		SMKN 2 WATAMPONE
BONE	SD INP. 1073 ARALLAE	SINJAI	SMPN 1 SINJAI	SIDRAP	SMAN 1 WATANG PULU
	SDN No. 261 TARASU		SMPN 1 SINJAI TENGAH		SMKN 1 PANCARIJANG
	SDN No. 92 ULÖE		SMPN 2 SINJAI TIMUR		SMA N 2 BANTAENG
SIDRAP	SDN 5 AMPARITA	BONE	SMPN 2 SINJAI UTARA	ENREKANG	SMAN 3 BANTAENG
	SDN 3 OTTING		SMPN 8 WATAMPONE		SMAN 1 BARAKA
BANTAENG	SD N 1 WATANG SIDENRENG	SOPPENG	SMPN 1 WATAMPONE	SELAYAR	SMK LATANRO
	SD INPRES LONRONG		SMPN 1 LILIRILAU		SMAN 1 BONTOMATENE
ENREKANG	SDN NO. 7 LETTA	WAJO	SMPN 1 DONRI-DONRI	MAROS	SMKN 3 BENTENG
	SDN 112 BELAJEN		SMPN 2 SENGKANG		SMAN 2 CAMBA MAROS
	SDN 8 TAMPAAAN		SMPN 1 GILIRENG		SMKN 2 SIMBANG
SELAYAR	SD INPRES 21 UJUNG	SIDRAP	SMPN 2 PANGSID	BULUKUMBA	SMK 3 Bulukumba
	SD INPRES BENTENG II		SMPN 1 WATANGPULU		SMAN 8 Bulukumba
MAROS	SDN 109 INPRES LEKOALA	LUWU	SMPN 2 BELOPA	PAREPARE	SMAN 1
	SDN 118 INP. MATAJANG		SMPN 2 BUPON		SMKN 3
BULUKUMBA	SDN 82 Palampang	LUWU UTARA	SMPN 6 PALOPO	LUWU TIMUR	SMA 1 MANGKUTANA
	SDN 7 Matajang		SMPN 1 SUKAMAJU		SMA 1 MALILI
PAREPARE	SDN 11	LUWU TIMUR	SMPN 1 SABBANG	SINJAI	SMK 1 TOMONI
	SDN 14		SMPN 1 MANGKUTANA		SMAN 2 SINJAI
	SDN 71		SMPN 1 MALILI		SMKN 2 SINJAI
LUWU TIMUR	SDN 203 BONGKA MANU	MAROS	SMPN 1 TOWUTI	WAJO	SMAN 1 MAJALENG
	SDN NO. 145 COBBU, KEC. SINJAI		SMPN 5 MANDAI		SMKN 1 PITUMPANUA
WAJO	SDN 135 AKKAJENG	PANGKEP	SMPN 1 TURIKALE	PINRANG	SMKN 3 PINRANG
	SDN 127 UJUNG TANAH		SMPN 1 MA'RANG		SMAN 1 PINRANG
PINRANG	SDN 88 PINRANG	BARRU	SMPN 1 MINASA TENE	MAKASSAR	SMKN 8 MAKASSAR
	SDN 168 PINRANG		SMPN 2 BARRU		SMAN 2 MAKASSAR
MAKASSAR	SDN. PONGTIKU II	PARE-PARE	SMPN 1 BALUSU	TAKALAR	SMAN 2 TAKALAR
	SDN KAKATUA MAKASSAR		SMPN 4 PARE-PARE		SMKN 1 TAKALAR
TAKALAR	SD NO 107 KUNJUNG	PINRANG	SMPN 9 PARE-PARE	TANA TORAJA	SMAN 3 MAKALE
SOPPENG	SDN 100 DARE BUNGA-BUNGAE		SMPN 1 MATTIRO SOMPE		SMPN 1 MAKALE
	LUWU UTARA	SDN 135 SALEBBO MARIO	ENREKANG	SMPN 1 CEMPA	SOPPENG
SDN No.173 Sukamaju		SMPN 1 ANGERAJA		SMK NEGERI 2 WATANSOPPENG	
SDN No.150 Pao		SMPN KRISTEN MAKALE		SMKN 1 Masamba	
	SDN NO.187 Bone-Bone	TANATORAJA	SMPN 1 RANTEPAO	LUWU UTARA	SMAN 2 Masamba
		TORAJA UTARA	SMPN 1 TIKALA		SMAN 4 LUWU UTARA

Sumber: LPMP Kota Makassar, 2018

Berdasarkan tabel diatas, LPMP Kota Makassar menjangkau seluruh sekolah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

4.2.1 Laporan Kegiatan BIMTEK

Sesuai dengan visi misi LPMP Kota Makassar, yakni dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, maka LPMP merancang program BIMTEK untuk dilaksanakan guna mencapai visi LPMP kota Makassar.

Tabel 3:
STRUKTUR PROGRAM BIMTEK SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (BIMTEK SPME)

Tanggal 13 s.d. 16 Mei 2018

NO	KOMPONEN	MATA DIKLAT	ALK WAKTU	FASILITATOR/NARASUMBER
1	UMUM (A)	1.1. Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan	2	Kepala LPMP Sulsel (Narasumber Eselon Narasumber Pusat Narasumber Pusat
		1.2. Penyegaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	3	
		1.3. Peran, Pembentukan dan Pemahaman TPMPD/SPME tentang Kewajiban Penerapan SPMI di Sekolah	3	
		Jumlah (1)	8	
2	POKOK (B)	2.1. Pengembangan Kemampuan TPMPD/SPME dalam Melaksanakan SPMI	2	1. Fasilitator 2. Fasilitator 3. Fasilitator 4. Fasilitator
		2.2. Strategi Penerapan SPMI secara Berjenjang atau Pengimbasan	2	
		2.3. Tugas TPMPD/SPME dalam Implementasi SPMI di Sekolah Imbas	2	
		2.4. Tugas TPMPD/SPME dalam Membantu Dinas Pendidikan melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPMI di Daerah	2	
		2.5. Inovasi dalam Peningkatan Mutu	2	
		2.6. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Data Mutu	2	
		2.7. Akselerasi Penerapan SPMI dan Peningkatan Mutu melalui Kemitraan	2	
		Jumlah (2)	14	

3	PENUNJANG (C)	3.1. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	2	1. Fasilitator
Jumlah (3)			2	
Jumlah (1 + 2 + 3)			24	

Sumber : LPMP Kota Makassar, 2018

Fasilitator

Kelas A: 1. Dr. Mardin, M.Pd ; 2. Fahrawati, S.S., M.Ed

Kelas B: 1. Dr. Endang Asrianti, S.S., M.Hum ; 2. Nur Dewi, S.Si., M.Si

Kelas C: 1. Drs. Darwis Sasmedi, M.Pd; 2. Ainun Farida, S.Si., M.Si

Kelas D: 1. Drs. Mansur HR, M.Pd; 2. Rahmaniari, S.Pd., M.Pd

4.2.2 Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis pada LPMP dilaksanakan dengan menyusun jadwal sebagai berikut :

1.

JADUAL KELAS A

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (BIMTEK SPME) TANGGAL 13 s.d. 16 MEI 2017

No	Waktu	Hari/tanggal				Ket.
		I	II	III	IV	
		13 Mei 2018	14 Mei 2018	15 Mei 2018	16 Mei 2018	
1	08.00 – 09.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
2	09.00 – 10.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
	10.00 – 10.15	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
3	10.15 – 11.15		A.1.2	B.2.4	PN	
4	11.15 – 12.15	Check in	A..1.3	B.2.4		
	12.15 – 13.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
5	13.30 – 14.30	Check In	A..1.3	B.2.5		
6	14.30 – 15.30	PB	A..1.3	B.2.5		
	15.30 – 15.45	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
7	15.45 – 16.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
8	16.45 – 17.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
9	17.45 – 19.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
10	19.00 – 20.00		B.2.2	B.2.7		
11	20.00 – 21.00		B.2.2	B.2.7		

Keterangan :

Narasumber Eselon (Kepala LPMP Sulsel)

Narasumber Pusat

Fasilitator Kelas A: 1. Dr. Mardin, M.Pd ; 2. Fahrawati, S.S., M.Ed

2.

JADUAL KELAS B
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
(BIMTEK SPME) TANGGAL 13 s.d. 16 MEI 2017

No	Waktu	Hari/tanggal				Ket.
		I	II	III	IV	
		13 Mei 2018	14 Mei 2018	15 Mei 2018	16 Mei 2018	
1	08.00 – 09.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
2	09.00 – 10.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
	10.00 – 10.15	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
3	10.15 – 11.15		A.1.2	B.2.4	PN	
4	11.15 – 12.15	Check in	A..1.3	B.2.4		
	12.15 – 13.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
5	13.30 – 14.30	Check In	A..1.3	B.2.5		
6	14.30 – 15.30	PB	A..1.3	B.2.5		
	15.30 – 15.45	Istirahat	istirahat	Istirahat	Istirahat	
7	15.45 – 16.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
8	16.45 – 17.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
9	17.45 – 19.00	Istirahat	istirahat	Istirahat	Istirahat	
10	19.00 – 20.00		B.2.2	B.2.7		
11	20.00 – 21.00		B.2.2	B.2.7		

Keterangan:

Narasumber Eselon (Kepala LPMP Sulsel)

Narasumber Pusat

Fasilitator Kelas B: 1. Dr. Endang Asrianti, S.S., M.Hum ; 2. Nur Dewi, S.Si., M.Si

3.

JADUAL KELAS C
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
(BIMTEK SPME) TANGGAL 13 s.d. 16 MEI 2017

No	Waktu	Hari/tanggal				Ket.
		I	II	III	IV	
		13 Mei 2018	14 Mei 2018	15 Mei 2018	16 Mei 2018	
1	08.00 – 09.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
2	09.00 – 10.00		A.1.2	B.2.3	C.3.1	
	10.00 – 10.15	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
3	10.15 – 11.15		A.1.2	B.2.4	PN	
4	11.15 – 12.15	Check in	A..1.3	B.2.4		
	12.15 – 13.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
5	13.30 – 14.30	Check In	A..1.3	B.2.5		
6	14.30 – 15.30	PB	A..1.3	B.2.5		
	15.30 – 15.45	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
7	15.45 – 16.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
8	16.45 – 17.45	A.1.1	B.2.1	B.2.6		
9	17.45 – 19.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	
10	19.00 – 20.00		B.2.2	B.2.7		
11	20.00 – 21.00		B.2.2	B.2.7		

Keterangan:

Narasumber Eselon (Kepala LPMP Sulsel)

Narasumber Pusat

Fasilitator Kelas C: 1. Drs. Darwis Sasmedi, M.Pd; 2. Ainun Farida, S.Si., M.Si

Berdasarkan laporan hasil kegiatan LPMP diatas, membuktikan LPMP konsisten dalam mengupayakan penjaminan mutu pendidikan di sulawesi selatan, kegiatan yang dihadiri oleh kepala, narasumber dan fasilitator yang berkompeten diharapkan mampu memberikan output yang berkualitas dalam pengembangan sekolah model.

4.2.3 Alokasi Dana Kegiatan

Adapun bantuan dana pemerintah untuk pengembangan sekolah akan dirincikan melalui kertas kerja satker dibawah ini:

Tabel 4 : Alokasi Dana Kegiatan

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018			
PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
Evaluasi Sekolah Model			
Belanja Bahan	10000	Rp 2.500	Rp 2.500.000
Honor Output Kegiatan	96	Rp 300.000	Rp 28.800.000
Belanja Perjalanan Dinas & Biasa	50	Rp 110.000	Rp 5.500.000
Jumlah			Rp 36.800.000
Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model			
Belanja Bahan	106	Rp 40.000	Rp 4.240.000
Honor Output Kegiatan	4	Rp 400.000	Rp 1.600.000
Belanja Perjalanan Dinas (Peserta & Narasumber)	4	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp 11.840.000
Asistensi Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model			
Belanja Bahan	10000	Rp 2.500	Rp 2.500.000
Belanja Perjalanan Biasa	48	Rp 275.000	Rp 13.200.000
Jumlah			Rp 15.700.000
Bimbingan Teknis Kepala Sekolah Sekolah Model			
Belanja Bahan	47	Rp 40.000	Rp 1.880.000
Honor Output Kegiatan	2	Rp 450.000	Rp 900.000
Belanja Perjalanan Dinas	21	Rp 150.000	Rp 3.150.000
Bimbingan Fasilitas Sekolah			Rp 13.917.967
Jumlah			Rp 19.847.967
Pendampingan Sekolah Model			
Bantuan Operasional Sekolah Model			Rp 4.800.000
Monitoring & Evaluasi			Rp 4.500.000
Jumlah			Rp 9.300.000
Total Biaya untuk Pendampingan Sekolah Model & Monitoring			Rp 93.487.967

Sumber: LPMP Sulsel, 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV mengenai laporan kegiatan pendampingan sekolah model, maka kesimpulan pada penulisan ini adalah pemanfaatan dana untuk pendampingan sekolah model sepenuhnya telah efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan telah tercapaikan dilihat dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP SulSel terhadap sekolah model.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Demi terwujudnya pemanfaatan dana pemerintah yang efektif, LPMP SulSel diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dan yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
2. Dari hasil penulisan ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat penulisan yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan, baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penulisan ini perlu diusulkan tema penulisan lanjutan yang lebih fokus, mendalam dan rinci .

DAFTAR PUSTAKA

Creswell. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. (<http://www.penalaran-unm.org>)
Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018

Grizzle dan Pettinjohn. 2002. *Teori Implementasi Kebijakan*,
(http://www.eprints.undip.ac.id/24007/1/Ari_Eko_widyantoro.pdf). Diakses pada
tanggal 21 Agustus 2018

Jogiyanto. 2007. *Sistem pendidikan dan sekolah model*. Yogyakarta: Andi.

Kumorotomo. 2004. *Mutu pendidikan*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mardiasmo. 2004. *Pendidikan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Andi.

Mcleod, Raymod. 2010. *Evaluasi dan mutu pendidikan*. Jakarta: Salemba Empat.

Niftahusadah. 2010. *Pengaruh Pengembangan Mutu Pendidikan Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Bandung*. Bandung.

UUD RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 116/O/1997
tanggal 23 April 1977.

Sagala, 2006. *Pendidikan Pembangunan Nasional*, Jakarta.

Sallis, 2015. *Mutu pendidikan*. Jakarta